



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan I Triwulan I Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Sebagai salah satu bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran, maka Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai kondisi dan situasi pelaksanaan kegiatan oleh BPPMHKP Medan I.

Semoga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian dalam pelaksanaan Kegiatan Triwulan I Tahun 2026 serta dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran berikutnya.

Deli Serdang, 16 April 2026

Kepala BPPMHKP Medan I,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nandang Koswara, S.TP., M.M

**Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Maksud dan Tujuan	1
I.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
I.4. Sistematika Penyajian.....	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	6
II.1. Rencana Strategis	6
II.2. Rencana Kerja	9
II.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja.....	9
II.4. Pengukuran Capaian Kinerja	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	13
III.1. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	13
III.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	41
BAB IV. PENUTUP.....	42
I.1. Kesimpulan	42
I.2. Rekomendasi	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Balai PPMHKP Triwulan I Tahun 2026	4
Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai PPMHKP Medan I Tahun 2026	10
Tabel 3. Target dan Realisasi IK.1 pada Triwulan I Tahun 2026	16
Tabel 4. Realisasi Anggaran IK.1 pada Triwulan I Tahun 2026	16
Tabel 5. Target dan Realisasi IK.2 pada Triwulan I Tahun 2026	18
Tabel 6. Realisasi Anggaran IK.2 pada Triwulan I Tahun 2026	18
Tabel 7. Target dan Realisasi IK.3 pada Triwulan I Tahun 2026	19
Tabel 8. Realisasi Anggaran IK.3 pada Triwulan I Tahun 2026	20
Tabel 9. Target dan Realisasi IK.4 pada Triwulan I Tahun 2026	22
Tabel 10. Realisasi Anggaran IK.4 pada Triwulan I Tahun 2026	22
Tabel 11. Target dan Realisasi IK.5 pada Triwulan I Tahun 2026	24
Tabel 12. Realisasi Anggaran IK.5 pada Triwulan I Tahun 2026	24
Tabel 13. Target dan Realisasi IK.6 pada Triwulan I Tahun 2026	25
Tabel 14. Realisasi Anggaran IK.6 pada Triwulan I Tahun 2026	25
Tabel 15. Target dan Realisasi IK.7 pada Triwulan I Tahun 2026	26
Tabel 16. Realisasi Anggaran IK.7 pada Triwulan I Tahun 2026	27
Tabel 17. Target dan Realisasi IK.8 pada Triwulan I Tahun 2026	28
Tabel 18. Realisasi Anggaran IK.8 pada Triwulan I Tahun 2026	28
Tabel 19. Target dan Realisasi IK.9 pada Triwulan I Tahun 2026	33
Tabel 20. Realisasi Anggaran IK.9 pada Triwulan I Tahun 2026	33
Tabel 21. Target dan Realisasi IK.10 pada Triwulan I Tahun 2026	34
Tabel 22. Realisasi Anggaran IK.10 pada Triwulan I Tahun 2026	35
Tabel 23. Target dan Realisasi IK.11 pada Triwulan I Tahun 2026	36
Tabel 24. Realisasi Anggaran IK.11 pada Triwulan I Tahun 2026	36
Tabel 25. Target dan Realisasi IK.12 pada Triwulan I Tahun 2026	39
Tabel 26. Realisasi Anggaran IK.12 pada Triwulan I Tahun 2026	40
Tabel 27. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan jenis kegiatan	40
Tabel 28. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan jenis belanja	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai PPMHKP Medan I	4
Gambar 2. Status indeks capaian indikator kinerja	12
Gambar 3. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Balai PPMHKP Medan I Triwulan I Tahun 2026	13
Gambar 4. Nilai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Sektor Produksi Primer Triwulan I Tahun 2026	15
Gambar 5. Nilai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Sektor Produksi Pascapanen Triwulan I Tahun 2026	18
Gambar 6. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.8 pada Aplikasi Kinerjaku	28
Gambar 7. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.12 pada Aplikasi Kinerjaku Triwulan I Tahun 2026	39

**BPP
MHKP**

**Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan I disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP)

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan I pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 114,76%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPMHKP Medan I yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

- A. Dari 12 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Triwulan I Tahun 2026, terdapat 6 (enam) indikator kinerja telah berhasil dilaksanakan dengan baik yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target.
- B. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Kegiatan		IKU	Target Triwulan I 2026	Realisasi Triwulan I 2026	% Capaian	Realisasi Triwulan I 2025
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Medan I	72%	72,03%	100,04%	100%
	2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan	72%	86,59%	120%	100%

		Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Medan I				
	3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Medan I	-	-	-	-
Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Lingkup Balai PPMHKP Medan I	71%	79,27%	111,65	-
Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Stasiun KIPM Medan II	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Medan I	-	-	-	-
	6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Medan I	-	-	-	-
	7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Medan I	-	-	-	-
	8.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Balai PPMHKP Medan I	86	100	116,28	100
	9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Medan I	-	-	-	-

10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Medan I	-	-	-	-
11.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Medan I	77%	100%	120	100
12.	Indeks kepuasan masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Medan I	3,5	3,80	108,57%	-

Kinerja Keuangan BPPMHKP Medan I Triwulan I Tahun 2026 mencapai 1.569.713.283,- (*Satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah*) atau 25,79% dari pagu anggaran BPPMHKP Medan I T.A 2025 sebesar Rp. Rp. 6.086.047.000,- (*Enam milyar delapan puluh enam juta empat puluh tujuh ribu rupiah*).

**BPP
MHKP**

**Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah diterapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, yaitu Laporan Kinerja BPPMHKP Medan I yang memberikan informasi tentang capaian sasaran strategis, capaian kinerja output dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

I.2. MAKSUD dan TUJUAN

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini disusun dengan maksud memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan operasional, non operasional, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan administrasi serta perkembangan-perkembangan yang telah dicapai Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan I pada Triwulan I Tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunannya agar dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam menentukan kebijakan dan perencanaan kegiatan di masa yang akan datang dalam peningkatan kinerja.

I.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Medan I sesuai Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan memiliki tugas melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan

hasil kelautan dan perikanan.

Selain itu BPPMHKP Medan I juga menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, dan verifikasi penerbitan sertifikat pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidaya ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan surveilans, pengambilan dan pengujian contoh, dan pemeriksaan tindak lanjut hasil surveilans, pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan penerbitan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
- e. Pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan, serta racun hayati di perairan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional, sistem manajemen mutu laboratorium, dan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi;
- g. Pelaksanaan kerja sama terkait layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- h. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan
- j. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

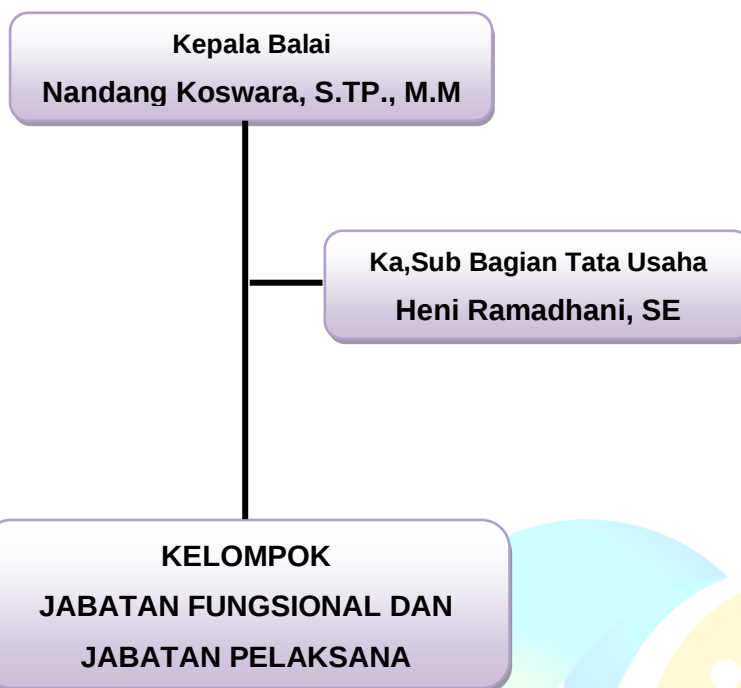
BPPMHKP Medan I dituntut untuk mampu meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan pengendalian dan pengawasan hasil kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir. Untuk itu, pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam perdagangan global..

BPPMHKP Medan I memberikan pelayanan berupa sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan (SMKHP) dengan rincian 9 layanan sertifikasi tersebut :

1. **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB):** Menjamin mutu produk budidaya ikan yang dihasilkan.
2. **Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB):** Menjamin kualitas benih ikan yang dihasilkan.
3. **Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB):** Menjamin mutu ikan selama proses penanganan, termasuk di atas kapal.
4. **Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB):** Menjamin mutu pakan ikan yang digunakan dalam budidaya.
5. **Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB):** Menjamin mutu obat-obatan yang digunakan dalam budidaya ikan.
6. **Sertifikasi Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB):** Menjamin mutu obat-obatan saat distribusi.
7. **Penjaminan Mutu Perikanan Pasca Panen (SKP dan HACCP):** Menjamin mutu produk perikanan pasca panen, termasuk standar pengolahan dan keamanan pangan.
8. **Sertifikasi Mutu Produk Perikanan Pasca Panen:** Menjamin mutu produk perikanan yang sudah diolah dan siap dikonsumsi.
9. **Sertifikasi Mutu Produk Perikanan Hulu:** Menjamin mutu produk perikanan yang berasal dari hulu, seperti benih dan pakan.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi UPT di Lingkup Balai PPMHKP Medan I dipimpin oleh Kepala yang dibantu oleh 1 (satu) Ka.Subbagian Umum 3 (tiga) Ketua Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian, serta kelompok Jabatan Fungsional, diantaranya Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan, Arsiparis, SDM Aparatur, Pranata Komputer, Keuangan APBN, Jabatan Fungsional Umum lainnya serta dibantu juga pegawai PPPK, pegawai PPPK paruh waktu dan pegawai PJLP dengan jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I saat ini berjumlah 37 orang pegawai.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai PPMHKP Medan I

Tabel 1 Jumlah Pegawai Balai PPMHKP Medan I Triwulan I Tahun 2026

No	Jabatan	Jenjang Fungsional		Jumlah
		Ahli	Terampil	
1	Pejabat Struktural	-	-	2
2	Fungsional Umum	-	-	2
3	Fungsional APBN	2	2	4
4	Inspektur Mutu	6	2	8
5	Fungsional SDM	1	1	2
6	Fungsional Arsiparis		1	1
7	Fungsional Pranata Komputer		1	1
8	Fungsional Statistisi	1		1
9	PPPK			8
10	PPPK Paruh Waktu			5
11	PJLP			3
Jumlah Pegawai				37

I.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2026 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- a) Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- b) Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- c) Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- d) Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- e) Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan hal-hal lainnya.

BPP
MHKP

Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BPPMHKP Medan I telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu 2025 - 2029 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana strategis ini memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Namun pada Tahun 2024 terjadi perubahan Organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu BKIPM berubah menjadi BPPMHKP yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan.

BKIPM bertansformasi menjadi BPPMHKP yang bertugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Arah kebijakan strategis pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan antara lain :

1. Perumusan dan penetapan standar, regulasi teknis yang harmonis dengan persyaratan mutu
2. Pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer dan pasca panen
3. Pengawasan mutu domestik.
4. Peningkatan kerjasama dan penyetaraan stardar dengan tujuan ekspor
5. Peningkatan kapasitas SDM pengendali mutu, prasarana dan sarana laboratorium penguji dan lembaga inspeksi

BPPMHKP Medan I sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP mempunyai tanggung jawab dalam mendukung mewujudkan Visi dan Misi BPPMHKP serta sesuai dengan tugas, fungsi dan peran BPPMHKP Medan I dalam mendukung Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, maka arah dan kebijakan yang di emban BPPMHKP Medan I mulai tahun 2024 adalah :

“Berkomitmen Untuk Terus Menjaga Mutu dan Keamanan Hasil Kelatan dan Perikanan di Indonesia”

Makna dari Sasaran Kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut :

Berkomitmen Untuk Terus Menjaga Mutu mengandung arti memiliki prinsip dan komitmen kuat dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan pada setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan mengandung arti menjamin seluruh produk hasil kelautan dan perikanan aman untuk dikonsumsi masyarakat.

a. Tujuan Strategis

Tujuan pembangunan BPPMHK merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BPPMHKP adalah menjamin keamanan produk hasil kelautan dan perikanan yang berkualitas baik, berkelanjutan serta berdaya saing untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

b. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan pengendalian dan pengawasan hasil kelautan dan perikanan yaitu :

1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggungjawab, dan Berkelanjutan;
4. Terselenggaranya Sistem pengendalian dan pengawasan hasil kelautan dan perikanan yang Sesuai Standar;
5. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem pengendalian dan pengawasan hasil kelautan dan perikanan Secara Profesional dan Partisipatif;
6. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara BPPMHKP Medan I yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas;
7. Tersedianya Manajemen Pengetahuan BPPMHKP Medan I yang Handal dan Mudah Diakses;
8. Terwujudnya Birokrasi BPPMHKP Medan I Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima;
9. Terkelolanya Anggaran Pembangunan BPPMHKP Medan I Secara Efisien dan Akuntabel.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I, maka strategi yang diterapkan memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, yang merupakan kumpulan keputusan menentukan strategi yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan BPPMHKP dalam mendukung kebijakan nasional dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam 5 tahun kedepan, terkait pengembangan perkarantinaan ikan adalah “Kedaulatan, Keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan BPPMHKP Medan I disesuaikan dengan arah Kebijakan BPPMHKP. Adapun Kebijakan BPPMHKP Medan I adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan sebagai upaya untuk pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan (quality and safety assurance) hasil perikanan melalui strategi :
 - a. Pengembangan sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui :
 - Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
 - Penerapan sistem traceability pada Unit Pengolahan Ikan
 - Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra
 - Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
 - Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001) tahun 2015, sistem manajemen inspeksi (ISO 17020) tahun 2012, dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025) tahun 2008
 - b. Harmonisasi sistem penjaminan mutu yang Implementatif
 - Harmonis sistem, perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra (MoU/MRA) serta negara tujuan ekspor lainnya
 - Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi :
 - a. Pengelelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (Competency Based Human Resource Management);
 - b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
 - d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

- e. Penerapan ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang telah diperoleh tahun 2023
3. Peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM BPPMHKP Medan I melalui pelatihan dan bimbingan teknis
4. Pengembangan dan peningkatan laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi:
5. Meningkatkan performa dan kualitas pelayanan publik pada BPPMHKP Medan I

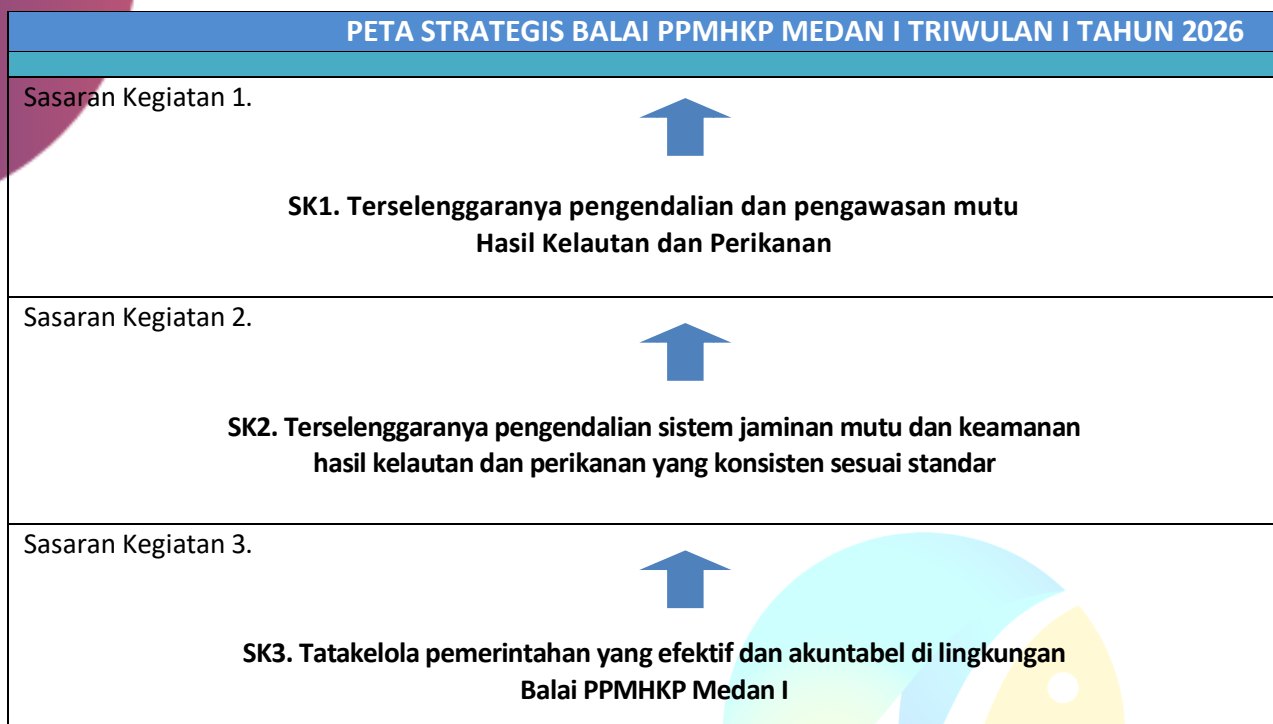
II.2 RENCANA KINERJA

Rencana kinerja Triwulan I Tahun 2026, yang disusun dengan pendekatan balance scorecard, merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis Balai PPMHKP Medan I 2025 – 2029 yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pada tingkat Balai PPMHKP Medan I diimplementasikan dalam penetapan target kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan peta strategi (strategy map) Balai PPMHKP Medan I Triwulan I Tahun 2026. Selanjutnya secara berjenjang target kinerja Balai PPMHKP Medan I tersebut diturunkan (cascading process) ke tingkat eselon IV sampai dengan tingkat individu.

Target dan capaian kinerja Balai PPMHKP Medan I Triwulan I Tahun 2026 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, serta peta strategi Balai PPMHKP Medan I Triwulan I Tahun 2026 telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif.

II.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.



Tabel 2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai PPMHKP Medan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2026
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT BPPMHKP Medan I	72%
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT BPPMHKP Medan I	72%
		3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Medan I	71
2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Medan I	71%

3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Medan I	5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Medan I	82,5
		6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Medan I	77
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Medan I	86,2
		8	Presentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Balai PPMHKP Medan I	86
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Medan I	92,1
		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Medan I	71,75
		11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Medan I	77%
		12	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Medan I	3,5

II.4 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari indikator kinerja Balai PPMHKP Medan I. Penghitungan tersebut akan dikonversi menjadi indeks capaian indikator kinerja. Ketentuan penetapan indeks capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Capaian maksimum adalah 120%
2. Capaian minimum adalah 0%
3. Status indeks capaian indikator adalah:

Warna	Keterangan
Istimewa	Nilai 110 – 120
Baik	Nilai 90 – <110
Cukup	Nilai 70 – <90
Kurang	Nilai 50 – <70
Sangat Kurang	Untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Gambar 2. Status indeks capaian indikator kinerja

Metode pengukuran kinerja Balai PPMHKP Medan I dilakukan secara berkala setiap triwulan. Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berjenjang dari masing-masing penanggung jawab indikator hingga level pimpinan. Tahapan terakhir dalam proses pengukuran kinerja adalah verifikasi dan validasi capaian kinerja. Hal ini untuk memastikan bahwa capaian yang dilaporkan di aplikasi kinerjaku sesuai dengan data dukung yang dilampirkan.

**BPP
MHKP**

**Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

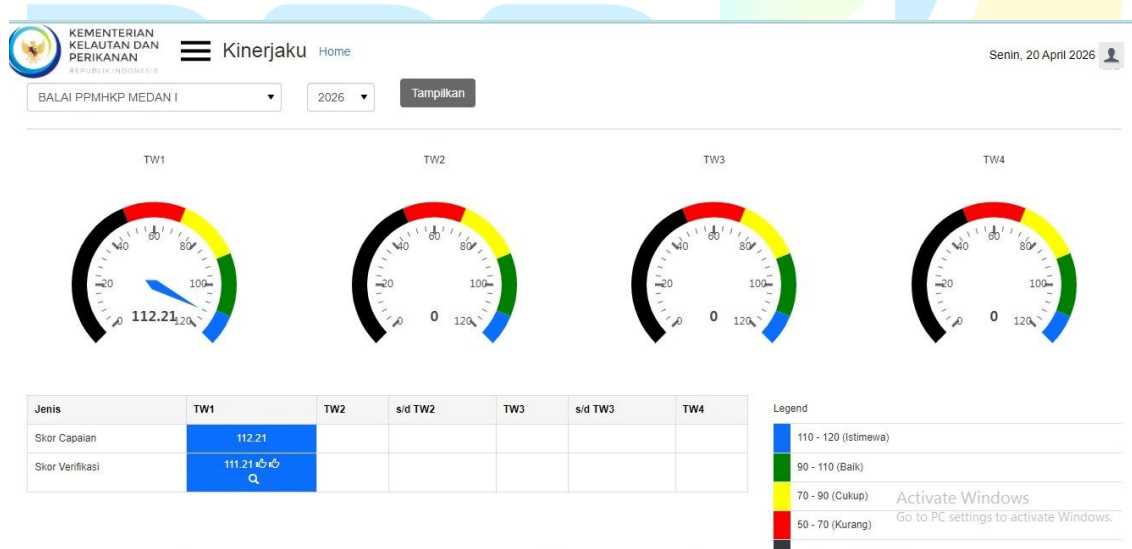
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

III. 1. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja berdasarkan sasaran startegis secara lebih detail menurut indikator kinerja dan target dijelaskan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Balai PPMHKP Medan I pada Triwulan I Tahun 2026 sudah baik, hal ini dapat dilihat pada Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 112,21% berdasarkan pelaporan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja di www.kinjeraku.go.id



Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Gambar 3. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Balai PPMHKP Medan I Triwulan I Tahun 2026

SS.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan 3 (tiga) indikator, yaitu Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Medan I, Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup Balai PPMHKP Medan I dan Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di

Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Medan I.

IK.1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT BPPMHKP Medan I

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu terhadap unit usaha yang telah menerapkan program persyaratan dasar, manajemen keamanan pangan berbasis HACCP, dan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, surveilan, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pengawasan Mutu adalah kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui surveilans.

Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu adalah ukuran pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap unit usaha untuk memastikan produk hasil perikanan yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, ditetapkan melalui penilaian terhadap dimensi pengendalian mutu dan dimensi pengawasan mutu

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Pada Triwulan I Tahun 2026 IK 1 ini memiliki target 72% dan telah terealisasi sebesar 72,03%, sehingga persentase capaian pada Triwulan I Tahun 2026 adalah 100,04%.

Capaian IKU ini diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut:

$$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn}$$

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT

A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

$$X = \frac{80,17+70+70+70+70}{5}$$

$$= 72,03$$

No	Satuan Kerja	Target (%)	TE CBIB	TE CPIB	TE CDOIB-CPOIB	TE CPPIB	TE CPIB Kapal	Realisasi IKU UPT	% Capaian IKU UPT
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	72,00	89,44	71,00	70,00	90,00	89,33	81,95	113,83%
2	Balai PPMHKP Medan I	72,00	80,17	70,00	70,00	70,00	70,00	72,03	100,05%
3	Balai PPMHKP Tanjung Pinang	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	85,83	73,57	102,18%
4	Balai PPMHKP Lampung	72,00	88,33	71,00	70,00	90,00	70,00	77,87	108,15%
5	Balai PPMHKP Jakarta	72,00	90,00	70,00	70,00	70,00	90,00	78,00	108,33%
6	Balai PPMHKP Semarang	72,00	71,00	70,00	88,33	70,00	90,00	77,87	108,15%
7	Balai PPMHKP Surabaya II	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,20	97,50%
8	Balai PPMHKP Entikong	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
9	Balai PPMHKP Balikpapan	72,00	70,00	71,00	70,00	70,00	90,00	74,20	103,06%
10	Balai PPMHKP Banjarbaru	72,00	89,17	90,00	70,00	70,00	89,67	81,77	113,57%
11	Balai PPMHKP Tarakan	72,00	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00	74,00	102,78%
12	Balai PPMHKP Denpasar	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	90,00	74,40	103,33%
13	Balai PPMHKP Mataram	72,00	89,44	70,00	70,00	70,00	70,00	73,89	102,62%
14	Balai PPMHKP Manado	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	90,00	74,20	103,06%
15	Balai PPMHKP Makassar	72,00	81,00	70,00	70,00	70,00	90,00	76,20	105,83%
16	Balai PPMHKP Ambon	72,00	70,00	71,00	70,00	70,00	88,75	73,95	102,71%
17	Balai PPMHKP Jayapura	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
18	Stasiun PPMHKP Banda Aceh	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	97,22%
19	Stasiun PPMHKP Medan II	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	90,00	74,20	103,06%

Gambar 4. Nilai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Sektor Produksi Primer Triwulan I Tahun 2026

Analisis Keberhasilan

Melakukan identifikasi data unit usaha yang menjadi prioritas dilakukan sertifikasi produksi primer (CBIB, CPIB, CDOIB, CPPIB dan CPIB Kapal), serta melakukan koordinasi secara intensif dan pendampingan untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk dapat dilakukan sertifikasi.

Tabel 3. Target dan Realisasi IK.1 pada Triwulan I Tahun 2026

SS	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan				
IK.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Medan I				
TRIWULAN I TAHUN 2026			TRIWULAN I TAHUN 2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
72%	72,03%	100,04	70%	100%	120

Tabel 4. Realisasi Anggaran IK.1 Triwulan I Tahun 2026

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Lembaga Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang divalidasi	106.850.000	12.210.000	11,43%
Unit Produksi primer yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	11.000.000		

IK.2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Medan I

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, surveilan, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pengawasan Mutu adalah kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui surveilans.

Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu adalah ukuran pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap unit usaha untuk memastikan produk hasil perikanan yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, ditetapkan melalui penilaian terhadap dimensi pengendalian mutu dan dimensi pengawasan mutu

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

BPPMHKP Medan I memiliki capaian indikator sebesar 86,59% dari target 72%, dengan persentase capaian sebesar 120%. Nilai ini diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut:

$$X = \frac{A+B+C}{3}$$

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT ...

A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

$$X = \frac{93,70\% + 91,06\% + 75\%}{3}$$

$$= 86,59\%$$

Analisis Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator ini dikarenakan pelaksanaan sertifikasi HACCP sesuai dengan grade HACCP produk unit pengolahan ikan dan selain itu terdapat unit pengolahan ikan yang mengajukan penambahan ruang lingkup produk sertifikat HACCP baru, sehingga

dilakukan inspeksi sertifikasi HACCP untuk penambahan ruang lingkup produk baru tersebut.

Tabel 5. Target dan Realisasi IK.2 pada Triwulan I Tahun 2026

SS	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan				
IK.2	<i>Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Medan I</i>				
TRIWULAN I TAHUN 2026			TRIWULAN I TAHUN 2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
72%	86,59%	120	70	100	120

Tabel 6. Realisasi Anggaran IK.2 Triwulan I Tahun 2026

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.2		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	405.000.000	25.005.025	6,17%

No	UPT	Target	TE HACCP	TE SKP	TE SPDI	Nilai Capaian IKU UPT
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	72%	93,20%	86,95%	75,00%	85,05%
2	Balai PPMHKP Ambon	72%	98,34%	90,00%	62,50%	83,61%
3	Balai PPMHKP Balikpapan	72%	91,67%	83,34%	75,00%	83,34%
4	Balai PPMHKP Banjarbaru	72%	97,00%	98,67%	75,00%	90,22%
5	Balai PPMHKP Denpasar	72%	98,89%	96,67%	75,00%	90,19%
6	Balai PPMHKP Entikong	72%	77,78%	77,78%	75,00%	76,85%
7	Balai PPMHKP Jakarta	72%	90,23%	89,38%	91,06%	90,22%
8	Balai PPMHKP Jayapura	72%	70,00%	90,83%	62,50%	74,44%
9	Balai PPMHKP Lampung	72%	98,34%	90,00%	75,00%	87,78%
10	Balai PPMHKP Makassar	72%	93,75%	90,56%	80,00%	88,10%
11	Balai PPMHKP Manado	72%	88,55%	84,92%	75,00%	82,82%
12	Balai PPMHKP Mataram	72%	93,62%	90,65%	75,00%	86,42%
13	Balai PPMHKP Medan I	72%	93,70%	91,06%	75,00%	86,59%
14	Balai PPMHKP Semarang	72%	93,89%	91,53%	75,00%	86,61%
15	Balai PPMHKP Surabaya II	72%	95,42%	89,76%	62,50%	82,56%
16	Balai PPMHKP Tanjungpinang	72%	91,39%	90,27%	75,00%	85,55%
17	Balai PPMHKP Tarakan	72%	93,74%	89,29%	75,00%	86,01%
18	Stasiun PPMHKP Aceh	72%	77,78%	77,78%	75,00%	76,85%
19	Stasiun PPMHKP Bandung	72%	87,24%	78,90%	75,00%	80,38%
20	Stasiun PPMHKP Batam	72%	85,74%	84,62%	62,50%	77,62%
21	Stasiun PPMHKP Bau-Bau	72%	77,78%	77,78%	62,50%	72,69%
22	Stasiun PPMHKP Bengkulu	72%	90,89%	70,33%	87,50%	82,91%
23	Stasiun PPMHKP Bima	72%	77,78%	77,78%	62,50%	72,69%
24	Stasiun PPMHKP Cirebon	72%	98,34%	90,00%	87,50%	91,95%
25	Stasiun PPMHKP Gorontalo	72%	73,89%	76,11%	87,50%	79,17%
26	Stasiun PPMHKP Jambi	72%	68,33%	86,35%	75,00%	76,56%
27	Stasiun PPMHKP Kendari	72%	99,17%	100,00%	62,50%	87,22%
28	Stasiun PPMHKP Kupang	72%	90,88%	89,77%	75,00%	85,22%
29	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	72%	77,78%	93,89%	75,00%	82,22%
30	Stasiun PPMHKP Mamuju	72%	66,68%	66,68%	75,00%	69,45%
31	Stasiun PPMHKP Medan II	72%	91,93%	90,14%	75,00%	85,69%
32	Stasiun PPMHKP Merak	72%	73,82%	73,82%	62,50%	70,05%
33	Stasiun PPMHKP Merauke	72%	77,78%	77,78%	75,00%	76,85%
34	Stasiun PPMHKP Padang	72%	54,43%	76,65%	75,00%	68,69%
35	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	72%	54,43%	73,87%	75,00%	67,77%

Gambar 5. Nilai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Sektor Produksi Pascapanen Triwulan I Tahun 2026

IK.3 Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Medan I

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan.

Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.

Lokasi dari kegiatan pengawasan ini dilakukan di kab/kota yang konsumsi ikannya, tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional, supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan lokasi wilayah perairan/pelabuhan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestic yang bebas dari cemaran marine biotoxin dan cemaran kimia berbahaya.

Pada triwulan I tahun 2026 Balai PPMHKP Medan I belum memiliki capaian untuk indikator ini dikarenakan perhitungannya dilakukan semesteran.

Rencana Aksi

Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2026 untuk tahap I.

Tabel 7. Target dan Realisasi IK.3 pada Triwulan I Tahun 2026

SS		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan			
IK.3		Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Medan I			
TRIWULAN I TAHUN 2026			TRIWULAN I TAHUN 2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	-	-	-

Tabel 8. Realisasi Anggaran IK.3 Triwulan I Tahun 2026

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.3		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Hasil perikanan di wilayah RI sektor produksi primer yang diawasi mutunya	25.000.000	-	-

SS.2 Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar

Keberhasilan Capaian Sasaran Kegiatan ini pada Balai PPMHKP Medan I diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja saja yaitu : Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Medan I.

IK.4 Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Medan I

Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional

Nilai kualitas penerapan Quality Managemen System (QMS) diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem jaminan mutu untuk unit yang telah dilakukan verifikasi

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup; 2. Acuan Normatif; 3. Persyaratan Umum; 4. Persyaratan Struktural; 5. Persyaratan Sumber Daya; 6. Persyaratan Proses; 7. Persyaratan Sistem Manajemen;

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan Iso/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020). yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Pada Triwulan I Tahun 2026 Balai KIPM telah berhasil memperoleh nilai penerapan sistem manajemen mutu laboratorium sebesar 77,63 dan nilai penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sebesar 76,40, sehingga nilai implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Medan I triwulan I adalah 77,02 dari target 71, dan persentase capaian sebesar 108,47%.

Capaian IKU ini diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut:

$$X = \frac{A+B+C}{3} \times 100\%$$

A= Persentase nilai penerapan ISO 17020

B= Persentase nilai penerapan ISO 17025

C= Persentase nilai penerapan Quality Manajemen System

$$X = \frac{77,63+76,40+83,78}{3} \times 100\%$$

$$= 79,27$$

Analisis Keberhasilan

BPPMHKP Medan I telah melakukan kegiatan dilaboratorium dan memenuhi dokumen-dokumen yang akan disurveilan oleh pihak asesor dan segera menindaklanjuti tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian surveilan SNI ISO/IEC 17025:2017.

Tabel 9. Target dan Realisasi IK.4 pada Triwulan I Tahun 2026

SS	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan				
IK.4	<i>Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Medan I</i>				
TRIWULAN I TAHUN 2026			TRIWULAN I TAHUN 2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
71%	79,27%	111,65	0	0	0

Tabel 10. Realisasi Anggaran IK.4 Triwulan I Tahun 2026

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	40.500.000	13.972.572	34,50%
Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium	43.000.000	1.500.000	3,5%

SS.3 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Balai PPMHKP Medan I

Capaian kinerja Balai PPMHKP pada sasaran Tata kelola Pemerintahan yang Baik berasal dari Indikator Kinerja:

- 1) Indeks profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Medan I;
- 2) Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Medan I;
- 3) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Medan I;
- 4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Balai PPMHKP Medan I;
- 5) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Medan I;
- 6) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Medan I
- 7) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Medan I;
- 8) Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Medan I.

IK.5 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Medan I

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut :

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-m

Pada Triwulan I Tahun 2026 BPPMHKP Medan I belum memiliki capaian, dikarenakan perhitungannya dilakukan semesteran.

Rencana Aksi

Seluruh pegawai BPPMHKP Medan I berupaya mengikuti seminar, diklat/pelatihan teknis dan 20 jp untuk meningkatkan kompetensi pegawai sehingga target tahunan dapat tercapai dan diupayakan untuk meningkatkan kualifikasi pegawai dengan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta mengupayakan agar pegawai selalu mengikuti seluruh aturan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari hukuman disiplin yang dapat mengurangi nilai IP ASN.

Tabel 11 Target dan Realisasi IK.5 pada Triwulan I Tahun 2026

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Balai PPMHKP Medan I				
IK.5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Medan I				
TRIWULAN I TAHUN 2026			TRIWULAN I TAHUN 2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	-	-	-

Tabel 12. Realisasi Anggaran IK.5 Triwulan I Tahun 2026

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Monitoring data kehadiran dan SKP	36.125.000	7.742.371	21,43%

IK.6 Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Medan I

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

- Pembangunan zona integritas (bobot 30%)

- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
- d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
- e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
- f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Pada triwulan I tahun 2026 Balai PPMHKP Medan I belum memiliki capaian untuk indikator Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Medan I dikarenakan perhitungannya dilakukan tahunan.

Rencana Aksi

Balai PPMHKP Medan I berupaya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan nilai pembangunan integritas seperti melaksanakan kegiatan dalam pembangunan zona integritas, program pengendalian gratifikasi, penanganan pengaduan masyarakat, pengelolaan konflik kepentingan, pengelolaan harta kekayaan aparatur (LHKPN) dan pengendalian kecurangan.

Tabel 13 Target dan Realisasi IK.6 pada Triwulan I Tahun 2026

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel d Lingkungan Balai PPMHKP Medan I				
IK.6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Medan I				
TRIWULAN I TAHUN 2026			TRIWULAN I TAHUN 2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	-	-	-

Tabel 14. Realisasi Anggaran IK.6 Triwulan I Tahun 2026

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pembangunan dan maintenance WBK WBBM	15.561.000	-	-

IK.7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Medan I

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Nilai PM SAKIP level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%) dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP.

BPPMHKP Medan I selalu berupaya untuk meningkatkan nilai penilaian mandiri SAKIP dengan selalu menyelaraskan antara target pada PK, data dukung, Manual IKU sampai pada pelaporan kinerja.

Nilai PM SAKIP level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I. Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Mitra, maka nilai SAKIP level II diperoleh melalui Penilaian oleh Sekretariat BPPMHKP.

Pada Triwulan I Tahun 2026 Balai PPMHKP Medan I belum memiliki capaian realisasi atas indikator ini dikarenakan penilaiannya dilakukan tahunan.

Rencana Aksi

Balai PPMHKP Medan I akan melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi penilaian capaian Penilaian Mandiri SAKIP dalam komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal antara lain: Renstra, Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rincian Target IKU, Rencana Aksi dan penyampaian laporan kinerja tepat waktu yang disampaikan pada aplikasi Kinerjaku.

Tabel 15. Target dan Realisasi IK.7 pada Triwulan I Tahun 2026

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel d Lingkungan Balai PPMHKP Medan I				
IK.7	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Medan I				
TRIWULAN I TAHUN 2026			TRIWULAN I TAHUN 2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	-	-	-

Tabel 16. Realisasi Anggaran IK.7 Triwulan I Tahun 2026

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Monev, koordinasi, konsultasi, PPID, MR	35.672.000	11.358.689	31,84%

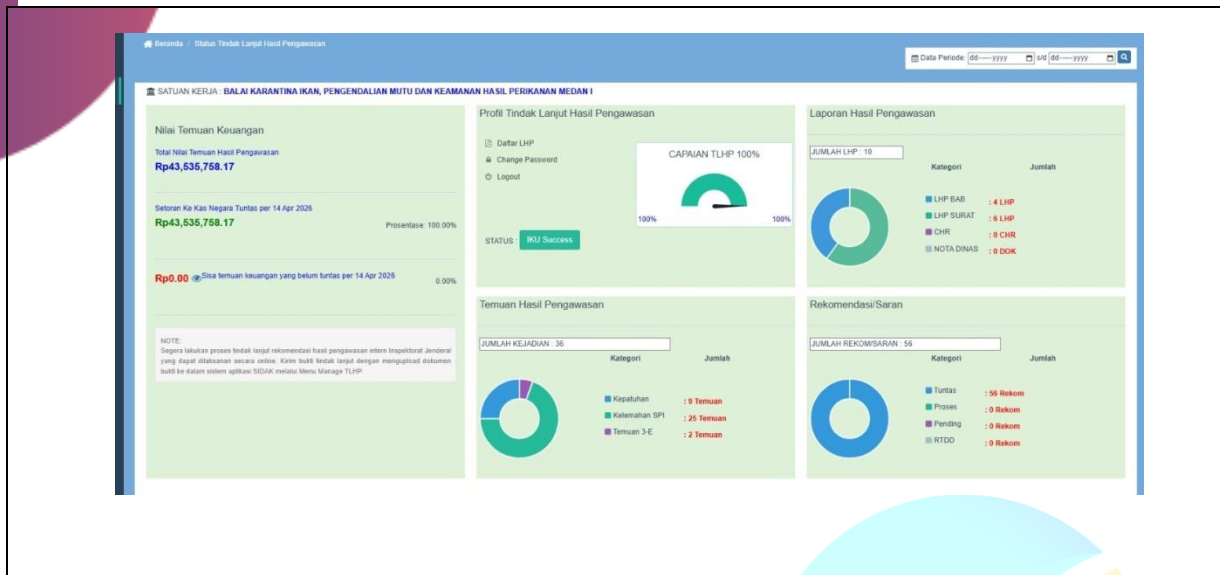
IK.8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Medan I

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan.

Untuk unit kerja yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah temuan/rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP samasekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran.

Untuk indikator ini BPPMHKP Medan I memiliki target 86% pada Triwulan I Tahun 2026 dengan realisasi sebesar 100% sehingga persentase capaian hasil pengawasan sebesar 116,28%.

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI PPMHKP MEDAN I TAHUN 2026																																																	
Nama Indikator	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Balai PPMHKP Medan I (%)																																																
Nama Tim	Dukungan Manajemen																																																
Periode Laporan	Triwulan I																																																
Nama Sasaran Strategis	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Medan I																																																
Nama IKU	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Balai PPMHKP Medan I (%)																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Tahun 2026</th> <th>Capaian</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Sim. 1</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> <th>Sim. 2</th> <th>Tahunan</th> <th>Th. 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Target</td> <td>86%</td> <td>86%</td> <td>86%</td> <td>86%</td> <td>86%</td> <td>86%</td> <td>86%</td> </tr> <tr> <td>Realisasi</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>%Capaian</td> <td>116,28%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Tahun 2026						Capaian	Target	Q1	Q2	Sim. 1	Q3	Q4	Sim. 2	Tahunan	Th. 2026	Target	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	Realisasi	100%							%Capaian	116,28%						
Tahun 2026						Capaian	Target																																										
Q1	Q2	Sim. 1	Q3	Q4	Sim. 2	Tahunan	Th. 2026																																										
Target	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%																																										
Realisasi	100%																																																
%Capaian	116,28%																																																
Catatan : Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Triwulan 1, 2, 3 dan 4 Sim. 1 = Capaian Q1 + Q2 Sim. 2 = Capaian Q3 + Q4 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026																																																	
Deskripsi Isu Utama dan Implikasi - Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang telah ditindaklanjuti (berdasarkan proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan. - Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Explan di BPPMHKP.																																																	
Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan/ kegagalan pencapaian indikator Cara Pengukuran : Perhitungan berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2026 : $X = \frac{R}{N} \times 100\%$ X = Nilai Rekomendasi Hasil Pengawasan R = Jumlah Rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti N = Jumlah Rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan																																																	
Realisasi Pada triwulan I Tahun 2026 tidak terdapat audit dan Inspektorat Jenderal KKP, sehingga realisasi indikator kinerja ini 100% sama seperti pada periode triwulan IV tahun 2024 realisasi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada triwulan I tahun 2024, maka nilainya sama yaitu 100%.																																																	
Rekomendasi Rencana Aksi untuk triwulan berikutnya - Operator SIDA melakukan pemantauan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan Itjen KKP. - Satuan Kerja melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Itjen KKP.					Penanggung Jawab Ketua Tim Dukungan Manajemen																																												
Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya					Penanggung Jawab Ketua Tim Dukungan Manajemen																																												
Deli Serdang, 13 April 2026 Penanggungjawab Indikator Kinerja <i>[Signature]</i> Heni Ramadhani, SE																																																	



Gambar 6. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.8 pada Aplikasi Kinerja

Analisis Keberhasilan

BPPMHKP Medan I selalu berupaya menindak lanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP yang menjadi objek pengawasan untuk mencapai keberhasilan indikator ini dan diupload pada aplikasi SIDAK.

Tabel 17. Target dan Realisasi IK.8 pada Triwulan I Tahun 2026

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel d Lingkungan Balai PPMHKP Medan I				
IK.8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT BPPMHKP Medan I				
TRIWULAN I TAHUN 2026			TRIWULAN I TAHUN 2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
86	100	116,28	85%	100%	117,65

Tabel 18. Realisasi Anggaran IK.8 Per Triwulan I Tahun 2026

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
BMN, Humas, Kearsipan	11.651.000	-	-

IK.9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT BPPMHKP Medan I

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Revisi DIPA, Deviasi RPD, pengelolaan uang persediaan, LPJ Bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, realisasi anggaran, retur SP2D, renkas, Pengembalian SPM, dispensasi SPM, pagu minus dan konfirmasi capaian output.

BPPMHKP Medan I telah berupaya untuk selalu meningkatkan nilai IKPA dengan meminimalisir tingkat kesalahan SPM dan meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan-laporan yang mendukung peningkatan nilai IKPA satker.

Pada Triwulan I Tahun 2026 ini Satker BPPMHKP Medan I belum memiliki capaian nilai IKPA dikarenakan perhitungannya dilakukan semesteran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

1. Revisi DIPA

- a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
- b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi yang dilakukan antara lain :
 - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
 - Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.

- c. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.
- Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

3. Pengelolaan UP

- a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
- b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
- c. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Seluruh satker agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan keKPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

4. LPJ Bendahara

- a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.
- b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
- c. Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT

5. Penyampaian Data Kontrak

- Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:Penyelesaian Tagihan :

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

- Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
- Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP

7. Penyerapan Anggaran

- Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: (15%), I (40%), V (60%), dan V (90%).

- b. Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

- a. Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
- b. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.
- Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

9. Perencanaan Kas

- a. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/ RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
- b. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/ Kesalahan SPM

- a. Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.
- b. tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.

Pada Triwulan I Tahun 2026 ini BPPMHKP Medan I belum memiliki capaian dikarenakan perhitungannya dilakukan semesteran.

Rencana Aksi

BPPMHKP Medan I selalu mengikuti dan mengupdate regulasi tentang pengelolaan keuangan negara guna meningkatkan nilai IKPA dari beberapa komponen antara lain: kualitas perencanaan anggaran yang terdiri dari revisi DIPA dan kesesuaian halaman III DIPA, kualitas pelaksanaan anggaran yang terdiri dari pengelolaan UP/TUP dan dispensasi SPM serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang merupakan penyampaian laporan capaian output yang tepat dan akurat.

Tabel 19. Target dan Realisasi IK.9 pada Triwulan I Tahun 2026

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Balai PPMHKP Medan I				
IK.9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP Medan I				
TRIWULAN I TAHUN 2026			TRIWULAN I TAHUN 2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	-	-	-

Tabel 20. Realisasi Anggaran IK.9 Triwulan I Tahun 2026

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Gaji dan Tunjangan	4.440.743.000	1.275.859.659	28,73

IK.10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Medan I

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2025 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Pada Triwulan I Tahun 2026 BPPMHKP Medan I belum memiliki realisasi dikarenakan perhitungannya dilakukan tahunan.

Rencana Aksi

Balai PPMHKP Medan I selalu berupa untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan melaksanakan efisiensi anggaran terhadap kinerja yang dilakukan, agar nilai kinerja perencanaan anggaran dapat tercapai.

Tabel 21. Target dan Realisasi IK.10 pada Triwulan I Tahun 2026

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Balai PPMHKP Medan I				
IK.10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Medan I				
TRIWULAN I TAHUN 2026			TRIWULAN I TAHUN 2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	-	-	-

Tabel 22. Realisasi Anggaran IK.10 Triwulan I Tahun 2026

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	58.338.000	-	-

IK.11 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Medan I

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP.

Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Capaian indikator ini diperoleh melalui perhitungan

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Indikator Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BPPMHKP Medan I Triwulan I

Tahun 2026 adalah 100% dari target 77 sehingga persentase capaian untuk Triwulan I Tahun 2026 adalah 120%.

Analisis Keberhasilan

BPPMHKP Medan I telah berupaya untuk mencapai realisasi indikator ini dengan melakukan:

- Mengupload rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP
- Telah melakukan pengadaan barang/jasa melalui LPSE
- Melaksanakan tahapan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Tabel 23. Target dan Realisasi IK.11 pada Triwulan I Tahun 2026.

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Balai PPMHKP Medan I				
IK.11	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Medan I				
TRIWULAN I TAHUN 2026			TRIWULAN I TAHUN 2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
77%	100%	120	76%	100%	120

Tabel 24. Realisasi Anggaran IK.11 Triwulan I Tahun 2026

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Layanan manajemen keuangan	23.892.000	5.780.000	24,19%
RK BMN/Penghapusan BMN	13.221.000	4.518.917	34,18%

IK.12 Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Medan I

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2017 tentang

Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada unit pelayanan BPPMHKP Medan I dengan tahapan terdiri dari: Persiapan, Pengumpulan data, Pengolahan dan analisa data dan Penyusunan laporan.

Pada triwulan ini Balai PPMHKP Medan I memiliki capaian sebesar 3,80 dari target 3,50, sehingga nilai persentase capaian indikator ini adalah 108,57%. Nilai ini diperoleh melalui perhitungan:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Jumlah Unsur 9

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang Total unsur yang terisi}}{\text{Jumlah Unsur}}$$

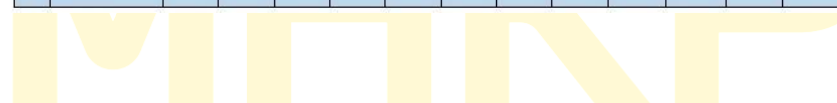
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: **IKM unit pelayanan x 25**

Balai PPMHKP Medan I mendapatkan peringkat ke 28 dari 47 UPT lingkup BPPMHKP dalam penilaian indikator ini, sedangkan Stasiun PPMHKP Gorontalo

mendapatkan peringkat pertama dalam perolehan nilai IKM lingkup BPPMHKP sesuai dengan surat dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 1066/BPPMHKP.1/HM.450/IV/2026 tanggal 10 April 2026 perihal Penyampaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026. Adapun perbandingan nilai IKM Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP)
lingkup BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026**

NO	OP	INDEKS PER-UNSUR LAYANAN									INDEKS	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Metode SKM
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
1	Stasiun PPMHKP Gorontalo	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	55	Online
2	Stasiun PPMHKP Palu	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	28	Online
3	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	A	Sangat Baik	11	Online
4	Stasiun PPMHKP Merak	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,98	3,98	4,00	3,98	3,99	99,81	A	Sangat Baik	43	Online
5	Balai PPMHKP Banjarbaru	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,97	3,99	3,99	3,99	3,99	99,77	A	Sangat Baik	157	Online
6	Stasiun PPMHKP Ternate	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	99,54	A	Sangat Baik	54	Online
7	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	3,99	3,98	3,99	3,97	3,98	3,96	3,98	3,97	3,98	3,98	99,46	A	Sangat Baik	225	Online
8	Stasiun PPMHKP Pangkal Pinang	4,00	3,94	3,97	3,92	3,94	4,00	3,97	3,94	4,00	3,97	99,15	A	Sangat Baik	36	Online
9	Stasiun PPMHKP Sorong	3,98	4,00	3,98	3,95	3,98	3,95	3,93	3,95	3,95	3,96	99,07	A	Sangat Baik	42	Online
10	Balai PPMHKP Mataram	3,96	3,92	3,96	3,96	3,96	3,92	3,96	3,96	3,96	3,95	98,82	A	Sangat Baik	26	Online
11	Stasiun PPMHKP Bengkulu	3,80	4,00	4,00	3,95	4,00	3,90	3,90	4,00	3,95	3,94	98,61	A	Sangat Baik	20	Online
12	Stasiun PPMHKP Bima	4,00	3,88	3,88	3,75	4,00	4,00	4,00	3,88	4,00	3,93	98,26	A	Sangat Baik	8	Online
13	Stasiun PPMHKP Aceh	3,67	4,00	4,00	3,67	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,93	98,15	A	Sangat Baik	3	Online
14	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	3,91	3,70	3,87	3,96	3,96	4,00	4,00	4,00	3,91	3,92	98,07	A	Sangat Baik	23	Online
15	Balai PPMHKP Makassar	3,93	3,92	3,92	3,90	3,93	3,90	3,91	3,92	3,92	3,92	97,96	A	Sangat Baik	368	Online
16	Stasiun PPMHKP Padang	4,00	4,00	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	4,00	3,88	3,92	97,92	A	Sangat Baik	8	Online
17	Balai PPMHKP Balikpapan	3,89	3,88	3,95	3,86	3,91	3,82	3,84	4,00	4,00	3,91	97,66	A	Sangat Baik	57	Online
18	Balai PPMHKP Denpasar	3,92	3,91	3,87	3,90	3,91	3,88	3,90	3,92	3,92	3,90	97,61	A	Sangat Baik	151	Online
19	Stasiun PPMHKP Pontianak	3,96	3,96	3,96	3,98	3,98	3,79	3,77	3,79	3,79	3,89	97,22	A	Sangat Baik	53	Online
20	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	3,93	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,93	3,93	3,93	3,89	97,22	A	Sangat Baik	14	Online
21	Stasiun PPMHKP Cirebon	3,94	3,92	3,92	3,91	3,87	3,85	3,84	3,89	3,86	3,89	97,20	A	Sangat Baik	118	Online
22	Stasiun PPMHKP Merauke	3,91	3,91	3,82	3,82	3,86	3,91	3,82	3,86	3,82	3,86	96,46	A	Sangat Baik	22	Online



**Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

5

23	Balai PPMHKP Ambon	3,88	3,86	3,84	3,79	3,83	3,90	3,86	3,90	3,86	3,86	96,46	A	Sangat Baik	58	Online
24	Balai PPMHKP Tanjung Pinang	3,88	3,85	3,82	3,90	3,86	3,85	3,85	3,91	3,87	3,84	96,05	A	Sangat Baik	138	Online
25	Stasiun PPMHKP Bandung	3,84	3,79	3,84	3,79	3,84	3,84	3,84	3,79	3,84	3,82	95,61	A	Sangat Baik	19	Online
26	Balai PPMHKP Jakarta	3,86	3,84	3,81	3,88	3,84	3,75	3,79	3,77	3,79	3,81	95,37	A	Sangat Baik	57	Online
27	Balai PPMHKP Tarakan	3,82	3,79	3,85	3,85	3,80	3,77	3,79	3,80	3,77	3,81	95,13	A	Sangat Baik	61	Online
28	Balai PPMHKP Medan I	3,84	3,81	3,84	3,84	3,81	3,81	3,84	3,81	3,63	3,80	95,09	A	Sangat Baik	43	Online
29	Balai PPMHKP Entikong	3,86	3,81	3,81	3,71	3,81	3,78	3,83	3,79	3,83	3,80	95,06	A	Sangat Baik	72	Online
30	Stasiun PPMHKP Bau-Bau	3,74	3,83	3,83	3,78	3,87	3,78	3,83	3,78	3,78	3,80	95,05	A	Sangat Baik	23	Online
31	Stasiun PPMHKP Medan II	3,87	3,81	3,75	3,85	3,79	3,71	3,75	3,88	3,77	3,80	94,93	A	Sangat Baik	52	Online
32	Balai PPMHKP Jayapura	3,60	4,00	3,80	3,80	4,00	3,60	3,80	3,80	3,60	3,78	94,44	A	Sangat Baik	5	Online
33	Balai PPMHKP Manado	3,73	3,77	3,77	3,77	3,73	3,73	3,77	3,77	3,82	3,76	94,07	A	Sangat Baik	22	Online
34	Balai PPMHKP Surabaya II	3,96	3,95	3,95	3,96	3,92	3,01	3,03	3,93	3,94	3,74	93,51	A	Sangat Baik	104	Online
35	Stasiun PPMHKP Palembang	3,83	3,76	3,72	3,76	3,76	3,55	3,72	3,86	3,69	3,74	93,49	A	Sangat Baik	29	Online
36	Stasiun PPMHKP Kupang	3,74	3,75	3,74	3,71	3,73	3,71	3,71	3,75	3,73	3,73	93,21	A	Sangat Baik	139	Online
37	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	3,62	3,81	3,76	3,71	3,67	3,81	3,71	3,71	3,62	3,71	92,86	A	Sangat Baik	21	Online
38	Stasiun PPMHKP Mamuju	3,77	3,69	3,69	3,69	3,69	3,77	3,62	3,77	3,69	3,71	92,74	A	Sangat Baik	13	Online
39	Stasiun PPMHKP Kendari	3,81	3,75	3,69	3,66	3,78	3,53	3,72	3,69	3,72	3,70	92,62	A	Sangat Baik	32	Online
40	Stasiun PPMHKP Batam	3,69	3,66	3,69	3,86	3,66	3,55	3,59	3,72	3,62	3,67	91,76	A	Sangat Baik	29	Online
41	Balai PPMHKP Semarang	3,67	3,62	3,65	3,67	3,64	3,53	3,58	3,71	3,68	3,64	91,06	A	Sangat Baik	101	Online
42	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	3,67	3,63	3,62	3,69	3,63	3,53	3,59	3,65	3,63	3,63	90,71	A	Sangat Baik	133	Online
43	Stasiun PPMHKP Jambi	3,67	3,67	3,53	3,67	3,47	3,60	3,60	3,67	3,60	3,61	90,19	A	Sangat Baik	15	Online
44	Pusat Manajemen Mutu	3,65	3,55	3,50	3,65	3,55	3,60	3,60	3,60	3,55	3,58	89,58	A	Sangat Baik	20	Online
45	Balai PPMHKP Lampung	3,73	3,65	3,57	3,59	3,54	3,43	3,43	3,68	3,51	3,57	89,26	A	Sangat Baik	37	Online
46	Balai Uji Standar PPMHKP Jakarta	3,68	3,59	3,38	3,59	3,54	3,41	3,51	3,59	3,54	3,54	88,44	A	Sangat Baik	37	Online
47	Stasiun PPMHKP Tahuna	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,11	77,78	B	Baik	1	Online

Gambar 7. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.12 pada Aplikasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Analisis Keberhasilan

BPPMHKP Medan I selalu memberikan pelayanan prima kepada seluruh pengguna jasa dan memberikan kenyamanan dalam setiap layanan seperti ruang tunggu yang nyaman, fast respon, sikap yang baik, penampilan profesional dan smile servis, sehingga hasil penilaian survey yang diberikan pengguna jasa mendapatkan hasil yang sangat baik .

Tabel 25. Target dan Realisasi IK.12 pada Triwulan I Tahun 2026

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel d Lingkungan Balai PPMHKP Medan I				
IK.12	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Medan I				
TRIWULAN I TAHUN 2026			TRIWULAN I TAHUN 2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
3,50	3,80	108,57	0	0	0

Tabel 26. Realisasi Anggaran IK.17 Per Triwulan I Tahun 2026

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Operasional dan pemeliharaan kantor	1.277.810.000	33.368.000	2,61%

Realisasi Anggaran

Tabel 27. Realisasi Anggaran BPPMHKP Medan I Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan Jenis Kegiatan

KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5.913.013.000	5.601.711.000	1.517.025.686	27,08%
3989 Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	547.850.000	400.836.000	37.215.025	9,28%
7010 Manajemen Mutu	83.500.000	83.500.000	15.472.572	18,53%
Jumlah	6.544.363.000	6.086.047.000	1.569.713.283	25,79%

Tabel 28. Realisasi Anggaran BPPMHKP Medan I Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	RELASISASI	
		(Rp)	Rp	%
Belanja Pegawai	4.440.743.000	4.423.857.000	1.275.859.659	28,84%
Belanja Barang	2.103.620.000	1.662.190.000	293.853.624	17,68%
Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah	6.544.363.000	6.086.047.000	1.569.713.283	25,79%

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran BALAI PPMHKP Medan I yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja. Adapun sumber daya pendukung pada BALAI PPMHKP Medan I meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang efisiensi belanja barang Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seluruh Kementerian/Lembaga diminta untuk melakukan penghematan pengguna anggaran. BPPMHKP Medan I juga berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan efisiensi anggaran dengan memaksimalkan realisasi kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK No. 214 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum (PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{\sum (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

E = Efisiensi

PAK_i = Pagu anggaran keluaran i

RAK_i = Realisasi anggaran keluaran i

CAK_i = Capaian keluaran i

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam efisiensi anggaran adalah terdapat kegiatan yang dilakukan sistem remot, atau melalui zoom dan terdapat beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan sekaligus seperti petugas lapangan juga melakukan pengujian laboratorium. Pada Triwulan I Tahun 2026 Balai PPMHKP Medan I juga melakukan revisi anggaran terkait efisiensi anggaran sehingga banyak kegiatan yang dilakukan hanya melalui zoom terutama kegiatan perjalanan dinas.

Sedangkan dari sumber daya manusia, dengan jumlah pegawai sebanyak 37 orang (21 orang PNS, 8 orang P3K, 5 orang P3K paruh waktu dan 3 orang PJLP), harus mampu meningkatkan kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi SDM adalah terdapat perangkapan tugas, seperti petugas teknis lapangan juga melakukan pengujian di laboratorium, pegawai kepegawaian juga sebagai operator persediaan dan BMN.

Dari hasil yang diperoleh BPPMHKP Medan I masih perlu meningkatkan nilai efisiensi penggunaan sumber daya, agar diperoleh nilai yang lebih baik untuk periode mendatang.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BPPMHKP Medan I Triwulan I Tahun 2026 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Secara umum rata-rata Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan I pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 109,84%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS)
2. Terdapat 2 indikator kinerja yang capaiannya di atas 120%, yaitu Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup Balai PPMHKP Medan I dan Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Medan I.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai PPMHKP Medan I pada Triwulan I Tahun 2026, sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya, perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan yang pencapaiannya dilaksanakan semesteran seperti Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI, IP ASN dan IKPA.

Tindak lanjut rekomendasi atas capaian kinerja triwulan III Triwulan I Tahun 2026

1. Setiap unit penanggung jawab kegiatan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Balai PPMHKP Medan I Triwulan I Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi kedepan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (good governance)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN MEDAN I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nandang Koswara**

Jabatan : Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**

Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Medan I



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nandang Koswara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN MEDAN I

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Medan I (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Medan I (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Medan I (Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Medan I (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Medan I	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Medan I (Indeks)	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Medan I (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Medan I (Nilai)	86,2
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Medan I (Persen)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Medan I (Nilai)	92,1
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Medan I (Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Medan I (%)	77
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Medan I (Indeks)	3.5

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	547.850.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	83.500.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	5.913.013.000
Total Anggaran Balai PPMHKP Medan I Tahun 2026		6.544.363.000

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Medan I



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nandang Koswara